

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan Tugas Akhir tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat 7 poin dalam prosedur DSP3, 8 poin prosedur penyusunan DSPP, serta terdapat 5 variabel yang menjadi patokan dalam menentukan Wajib Pajak yang masuk dalam DSPP, yaitu :

1. Indikasi ketidakpatuhan tinggi (adanya *tax gap*)
2. Indikasi modus ketidakpatuhan wajib pajak
3. Identifikasi nilai potensi pajak
4. Identifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*)
5. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak

Tahapan prosedur dan variable-variable tersebut digunakan untuk meningkatkan ketepatan usulan pengawasan dan pemeriksaan agar KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dapat dengan tepat menentukan sasaran penggalian potensi. Penyusunan DSPP pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sendiri dilakukan secara periodik setiap tahunnya dan sudah dilakukan sebanyak tiga tahap penyusunan yang terdiri dari tahap I, II, III sepanjang tahun 2019. Dari penyusunan DSPP menghasilkan prosentase ketepatan usulan

54,55% pada penyusunan Tahap I, kemudian meningkat menjadi 75% pada Tahap II, serta nihil pada Tahap III. Dari hasil data tersebut diharapkan dapat memberikan hasil pemeriksaan pajak yang dapat mendukung penerimaan pajak, mengurangi sengketa dengan wajib pajak, dan meminimalisasi tunggakan pajak.

3.2 Saran

Melihat dari detailnya tahap demi tahap prosedur penyusunan DSPP sehingga dapat menghasilkan daftar usulan yang lebih tepat sasaran, penulis memberikan saran agar KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tetap konsisten dalam menjalankan prosedur penyusunan DSPP, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat tepat menggali potensi pajak di cakupan wilayah kerja Mulyorejo. Akan tetapi selama DSPP masih ada maka, menjadi indikator pula bahwa masih ada tunggakan pajak yang belum terpenuhi, karena wajib pajak kurang menyadari pentingnya membayar pajak sesuai dengan pajak terhutang yang sebenarnya. Oleh sebab itu penulis juga menyarankan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo untuk menanamkan *awareness* atau kesadaran pajak sejak dini. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai kampanye, iklan layanan masyarakat, atau dengan memberikan pendidikan sadar pajak melalui institusi pendidikan.